

RADIKALISME SEBAGAI TANTANGAN DEMOKRATISASI DI BANGLADESH

Sukma Oktaviani, Gonda Yumitro

Prodi Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Malang

Email: mrspulubuhu@gmail.com, gonda@umm.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini menggambarkan radikalisme sebagai tantangan demokratisasi di Bangladesh. Cita-cita Bangladesh adalah menjadi negara Islam yang stabil. Namun, dalam menata tatanan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan politik melalui demokrasi, Bangladesh juga dihadapkan pada tantangan kebangkitan islam yang dipengaruhi oleh gerakan radikal seperti ISIS, AQIS dan lainnya. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan dengan data sekunder yang didapatkan melalui buku, jurnal, artikel ilmiah dan melalui berita internet. Data relevan yang dikumpulkan kemudian diubah menjadi data RIS melalui Aplikasi Mendeley, kemudian divisualisasikan dengan menggunakan Aplikasi Vosviewer. Penulis menemukan bahwa demokratisasi Bangladesh menghadapi tantangan dari perkembangan paham radikal yang semakin meningkat terutama sejak serangan terhadap WTC dan Pentagon pada 11 September 2001. Akar radikalisme ini berasal dari jaringan alumni perang Afghanistan yang tidak puas dengan instabilitas politik dalam negeri Bangladesh sehingga berusaha untuk melakukan gerakan islamisasi. Melalui gerakan radikal yang dikembangkan di berbagai kalangan termasuk mahasiswa, dan pengembangan metode cyber terrorism, perasaan aman di tengah masyarakat sebagai syarat suksesnya demokratisasi Bangladesh menjadi terganggu.

Kata Kunci: *Bangladesh, Demokrasi, Islam, Organisasi, Radikalisme*

ABSTRACT

This article describes the development of radicalism as the challenge of democratization in Bangladesh. Bangladesh expects to become a stable Islamic country. However, in managing its economic, social, cultural, and political life through democracy, Bangladesh faced the challenge of the rise of radical Islamic movements such as ISIS, AQIS, and others. The method used was a literature study with secondary data obtained through books, journals, scientific articles, and internet news. The relevant data collected is then converted into RIS data through the Mendeley Application, then visualized using the Vosviewer Application. The authors found that the democratization of Bangladesh faces a challenge from the rise of radicalism, especially since the attacks on the WTC and the Pentagon on September 11, 2001. The roots of this radicalism came from the network of Afghan war alumni who were dissatisfied with Bangladesh's domestic political instability, so they tried to carry out an Islamization movement. Through the development of the radical movement in various circles, including students, and the development of cyber terrorism methods, the feeling of security among the people as the requirement for the success of Bangladesh's democratization has been disturbed.

Keywords: *Bangladesh, Democracy, Islam, Organization, Radicalism*

PENDAHULUAN

Bangladesh adalah negara yang memiliki etnis asli suku Bengali Dan merupakan wilayah yang relatif kecil dengan luas sekitar 147.570 km² atau 56.977 mil. Penduduk terpadat menurut data tahun 2018, mencapai angka 162 juta lebih jiwa (BBS, 2018). Dari jumlah tersebut, 85% penduduk Bangladesh beragama Islam. Oleh karena itu, Bangladesh dikenal sebagai negara muslim dengan jumlah terbesar nomer empat setelah Indonesia, Pakistan, dan India(Aulihadi, 2018).

Bangladesh sebelumnya merupakan bagian Pakistan yakni wilayah Pakistan Timur. Tokoh pejuangnya adalah Mujibur Rahman, yang melihat adanya kesenjangan yang terjadi di antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Pakistan Timur selalu menjadi yang terpinggirkan dalam segala bidang karena fokus perhatian lebih banyak kepada Pakistan Barat. Hal ini menimbulkan gejolak baru dan menjadi akar keinginan Pakistan Timur menjadi negara merdeka yang terpisah dari Pakistan (Musdalipah, 2013).

Konflik antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti isu politik, militer, geografis, bahasa, pemerataan pembangunan, dan faktor ekonomi. Oleh karena itu, keinginan Pakistan Timur untuk merdeka semakin meningkat. Puncak ketegangan tersebut pada saat pemerintahan Ali Jinnah mendeklarasikan bahasa Urdu sebagai bahasa resmi Pakistan yang memicu konflik dan perpecahan di masyarakat dimana Pakistan Timur dengan suku asli mereka merasa termarginalkan sehingga mengharuskan Mujibur Rahman mendeklarasikan Program Enam Butir dalam Konferensi Nasional Partai Politik Oposisi di Lahore (Patmasari, 2016). Dalam deklarasi tersebut, Mujib menuntut agar Pakistan Timur diberikan otonomi dalam bidang politik, pertahanan, dan ekonomi. Akhirnya, Mujib mampu menggalang dukungan sehingga Pakistan Timur meraih kemerdekaan pada tahun 1971 (Aulihadi, 2018). Menariknya, pasca kemerdekaan, Bangladesh tidak sepenuhnya bebas dari konflik. Kaum muslim kemudian memperdebatkan etnis asli Bangladesh yaitu Bengali, sebab secara historis istilah Bengali merupakan istilah yang digunakan orang Hindu yang ada di Bengal. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini menjawab pertanyaan terkait demokratisasi Bangladesh yang membangkitkan semangat kelompok Islam untuk mempertahankan agama dan ingin mendirikan negara Islam Bangladesh.

Penelitian ini menggunakan dua konsep yaitu demokrasi dan radikalisme. Demokrasi merupakan konsep yang telah lama ada dan diterapkan oleh umat manusia sejak ribuan tahun lalu. Demokrasi yang paling dikenal adalah demokrasi dari masa Yunani Kuno sebab dari sinilah istilah demokrasi itu berasal, dimana demokrasi pada masa ini dikenal dengan istilah negara/kota yang memiliki undang-undang sendiri. Akan tetapi demokrasi pada masa tersebut masih mengesampingkan perempuan, budak, dan pekerja asing. Pericles sebagai salah satu tokoh yang berkontribusi dalam demokrasi Yunani Kuno mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan yang berada di tangan mayoritas dan bukan ditangan sekelompok kecil orang. Apabila dalam penyelesaian masalah pribadi, semua harus sama di mata hukum. Sedangkan dalam politik, keuntungan diperoleh mereka yang menang (Winner Take All) dan tidak diperkenankan menggunakan pertimbangan kelas dalam perolehan jasa, bahkan untuk yang masyarakat miskin (Mahfud, 2020). Henry B. Mayo mengartikan demokrasi sebagai sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan harus didasarkan pada kepentingan mayoritas berdasarkan hasil pemilu yang bebas dengan mengedepankan prinsip persamaan dalam politik (Putri, 2020).

Sejatinya, demokrasi tidak memiliki bentuk tunggal dalam pendefinisiannya, seperti yang dikatakan oleh Robert Dahl bahwa *"democracy has meant different things to different people in different periods."* Demokrasi dapat berbeda-beda pengertiannya karena bergantung pada siapa yang mengartikan dan bagaimana demokrasi itu didefinisikan. Hal inilah yang membuat implementasi demokrasi di berbagai negara itu berbeda-beda.

Praktik demokrasi di Bangladesh telah tampak pada saat perjuangan meraih kemerdekaan negaranya. Pada tahun 1970, Liga Awami partai yang dipimpin oleh Mujibur Rahman secara telak menjadi pemenang pemilu dengan memperoleh 160 kursi dari 162 kursi bagi Pakistan Timur untuk mendirikan wilayah otonom yang dikenal dengan Bangladesh (Jalal, 2004).

Berkaitan dengan radikalisme, seseorang dapat berpotensi menjadi radikal dan menganut ideologi radikalisme tergantung pada lingkungan yang ia tempati (Rokhmad, 2012). Seringkali seseorang tumbuh menjadi radikal akibat ketidakadilan dalam masyarakat dan cenderung dibarengi ketidakadilan ekonomi, politik, dan lemahnya hukum yang berlaku. Sehingga jika dalam suatu negara, terdapat militan yang telah dilumpuhkan tetapi

radikalisme masih tetap terulang dan selalu ada, hal itu dikarenakan keadilan dan kemakmuran yang tidak terwujud (Rokhmad, 2012).

Menurut Iman F. Ghifarie radikalisme dapat berubah menjadi terorisme karena terdapat satu fenomena yang memerlukan suatu tindakan. Ia menyatakan bahwa radikalisme terkait dengan model, sikap dan cara pengungkapan keberagaman seseorang, sedangkan terorisme merupakan tindakan kriminal yang melibatkan sekelompok orang. Berbagai ekspresi frustrasi dari kelompok tersebut apabila terus menerus dihadapkan dengan ketidakadilan sosial serta lembaga pemerintah yang terus bersikap abai menanggapi masalah yang ada, dapat memicu kelompok ini berubah menjadi ekstrim sehingga memilih cara kekerasan dalam mewujudkan dan mencapai keinginan mereka. Seorang dengan paham radikal pada level frustrasi tertinggi dapat melahirkan satu tindakan ekstrim seperti bom bunuh diri mengancam keamanan dan keselamatan orang lain (Ghifarie, 2016).

Paham radikal juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: 1) faktor agama; adanya semangat islamisasi global yang dianggap dapat menyelesaikan berbagai masalah. Kelompok islam radikal biasa menganggap bahwa Islam bukan hanya sekedar agama sebagaimana barat memandang, akan tapi Islam merupakan cara hidup yang sempurna dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Hal inilah yang menyebabkan gesekan dengan kelompok agama lainnya. 2) faktor sosial-politik; dalam peradaban global seringkali Islam tidak diuntungkan dan dicurigai sehingga merugikan komunitas kaum muslim. 3) faktor pendidikan; apabila semakin minim pengetahuan tentang agama, maka semakin berpotensi untuk terpengaruh oleh radikalisme. 4) faktor kultural; pemikiran muslim yang menganggap bahwa barat telah memarjinalkan seluruh kehidupan muslim sehingga menciptakan penindasan yang berujung pada keterbelakangan. 5) faktor ideologi yang anti western (Laisa, 2014).

Penelitian ini menarik karena cita-cita negara Bangladesh adalah menjadi negara Islam yang stabil sebagai negara sekuler, sedangkan bersamaan dengan keinginan tersebut radikalisme ternyata telah menunjukkan benihnya sejak kemerdekaan Bangladesh. Menurut Nazmul 2021 ekstrimisme Bangladesh mulai muncul ketika partai atau organisasi agama di Bangladesh menjadi semakin ekspansif dan ingin menguasai satu sama lain. Hal itu bertambah buruk ketika kondisi tata kelola negara Bangladesh yang lemah, sehingga membuat ketegangan yang terjadi antar organisasi tersebut meningkat menjadi terorisme

(Arefin & Ritu, 2021). Berdasarkan penjelasan ini, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana radikalisme menjadi tantangan demokratisasi Bangladesh?

TINJAUAN PUSTAKA

Shafi Md Mostofa dan Natalie J. Doyle menjelaskan bahwa Bangladesh merupakan negara padat penduduk yang memiliki banyak tantangan dalam menjalankan pemerintahan demokrasi. Pada bidang ekonomi Bangladesh menghadapi masalah pengangguran, kemiskinan, konflik politik, dan korupsi. Pada bidang sosial Bangladesh menghadapi trauma sosial berupa penindasan, ketidakadilan di kalangan masyarakat, pendidikan yang minim, lemahnya lembaga hukum dan ketertiban keamanan bahkan pemerintahan yang buruk. Menurut Shafi dan Natalie, elite penguasa yang telah menciptakan ruang bagi militansi Islam Bangladesh untuk berkembang dan mencari jalan mereka sendiri (Mostofa, S M.d, 2019).

Tantangan demokrasi yang dihadapi Bangladesh sama halnya seperti kebanyakan negara dunia ketiga. Bangladesh dihadapkan pada pelembagaan tatanan demokratis sekaligus tantangan target sasaran pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan negara. Peneliti Hossain mengidentifikasi demokratisasi Bangladesh berjalan sulit karena beberapa faktor. Pertama, tidak adanya budaya politik yang demokratis oleh rakyat Bangladesh. Rakyatnya kurang berkompeten dalam menghadapi nilai demokrasi. Kedua, tidak ada supremasi hukum. Pihak berwenang di Bangladesh mengambil tindakan hanya untuk kepentingan mereka. Ketiga, kurangnya moralitas politik. Keempat, masyarakat sipil yang lemah. Masyarakat Bangladesh tidak mampu membangun masyarakat sipil yang kuat dalam kerangka demokrasi. Masyarakat kurang memiliki rasa solidaritas dan lebih mementingkan identitas masing-masing. Kelima, tidak ada kepemimpinan politik yang kuat. Politik Bangladesh tidak mampu menyatukan bangsa dalam satu *platform*. Tidak ada harmonisasi dalam politik, dan cenderung bersifat konfrontatif dengan saling menentang satu sama lain (M.M. Awal Hossain, 2015).

Menurut David Lewis, praktik demokrasi di Bangladesh dapat terlihat melalui perkembangan civil society-nya. Bangladesh memiliki komunitas/LSM dari berbagai kalangan masyarakat yang mencari identitas dan legitimasi bagi diri mereka sendiri. Beberapa dari komunitas tersebut membangun aliansi antar kelompok berbeda untuk melakukan mobilisasi objek politik dan sosial. Sejak 1990-an komunitas di Bangladesh telah

membangun aliansi antara organisasi wanita, serikat buruh, dan media. Namun komunitas/LSM ini masih perlu melakukan upaya lebih optimal agar dapat menarik kepercayaan masyarakat (Lewis, 2004).

Di tingkat pedesaan, terdapat lembaga sosial dan organisasi feminis yang menonjol. Mereka menentang patriarki yang menyebabkan dominasi kaum laki-laki dalam hukum, ekonomi, dan politik. Bahkan sering terjadi kejahatan terhadap perempuan. Sehingga Bangladesh disebut sebagai negara sekuler yang tidak memiliki karakter kuat, mereka menyebut diri sebagai negara muslim moderat, tapi seringkali mendukung dan mentolerir segala macam bentuk kekerasan terhadap perempuan yang melampaui batas dan mengatasnamakan Islam (Karim, 2004).

Sanjay K. Bhardwaj mengemukakan bahwa politik Bangladesh telah menciptakan persaingan dua identitas yaitu identitas antara hindu dan islam. Sebelum era modern, Bangladesh memang telah diduduki oleh sebagian besar kelompok adat Bengal yang menyembah para dewa dan budaya agama mereka. Setelah merdeka, lahir otoritas dari militer dan juga kebangkitan hegemoni Islam dimana mereka membentuk komunitas Islam yang membuat persaingan kuat antara Hindu dan Muslim untuk mengontrol sumber daya. Pada pemilihan parlemen Bangladesh ke-9, terjadi persaingan antara Liga Awami yang menjanjikan toleransi dalam budaya politik negara. Sebaliknya aliansi Bangladesh National Party (BNP) Jamaat e-Islami Bangladesh (JIB) menjanjikan memberlakukan hukum negara yang berdasar pada Islam. Kemenangan Liga Awami dalam pemilihan kemudian semakin memicu kebangkitan Islam fundamentalis di Bangladesh (Bhardwaj, 2011).

Mengenai kebangkitan, Zillur Khan mengungkapkan bahwa pada 1990-an di mana saat Bangladesh sukses pada pemilihan umum mereka, telah memicu masalah pemberontakan etnis dan menciptakan ketidakseimbangan ekonomi dan politik. Bahkan pemberontakan ini berdampak kepada negara tetangga India dan Myanmar yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Beberapa masalah yang ditimbulkan akibat pemberontakan ini yaitu, masalah imigran ilegal ke India. Masyarakat menjadikan wilayah dari negara tetangga sebagai tempat perlindungan mereka, karena pemberontak melakukan serangan terhadap petugas Bangladesh dan bahkan melakukan teror terhadap warga sipil (Z. R. Khan, 1993). Tidak hanya itu, menurut Halal Khan perjalanan Bangladesh menuju demokrasi dikatakan sebagai perjalanan melodrama yang tragis. Hal ini karena insiden

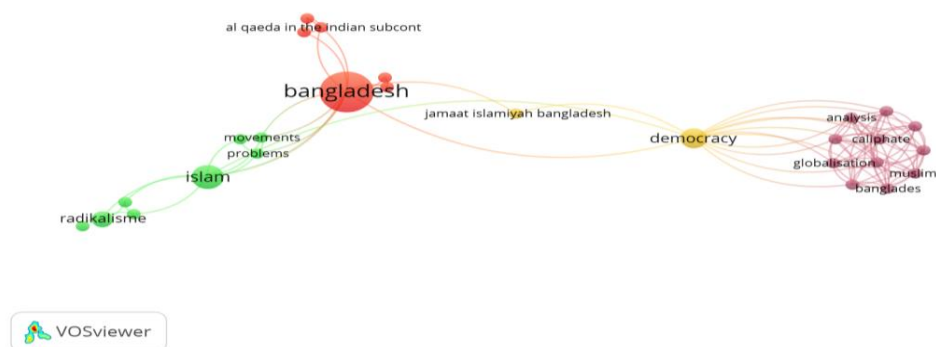
pemberontakan yang terus terjadi, konflik terus yang meningkat dengan cepat sehingga hampir tidak ada tempat aman bagi rakyat dan tidak ada platform politik Islam yang efektif di Bangladesh. Bangladesh hingga saat ini belum dapat membuktikan diri sebagai negara pelopor demokrasi yang baik, dan sulit mendukung hak asasi manusia (H. M. Khan, 2017).

METODE PENELITIAN

Metodologi untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah penelitian kualitatif-deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa website pencari jurnal seperti Tandfonfline, Sage Journal, DOAJ, dan Google Scholar. Untuk memudahkan pencarian data, penulis juga menggunakan aplikasi harzing: published or perished. Data relevan yang dikumpulkan penulis diubah menjadi data RIS menggunakan aplikasi Mendeley, kemudian diolah kembali menggunakan Software Vosviewer untuk mengetahui pembahasan yang paling banyak terkait dengan topik demokratisasi Bangladesh.

Penelitian kualitatif dengan visualisasi data menggunakan Vosviewer ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami bagaimana penulis memilih bahasan radikalisme Bangladesh yang berkembang bersamaan dengan proses Bangladesh dalam menuju negara demokrasi.

Gambar 1. Co-occurrence Radikalisme dalam Demokratisasi Bangladesh



Sumber: Vosviewer

PEMBAHASAN

Perkembangan Demokratisasi Bangladesh

Sebelum mengenal istilah demokrasi, Bangladesh telah menunjukkan nilai dan semangat demokrasi sejak kebangkitan Islam di Benggala Timur yang terjadi pada akhir

tahun 1960-an. Dalam sejarahnya, gerakan separatis dalam wujud etnis Bengali berusaha untuk melawan eksploitasi budaya, politik dan ekonomi yang pada saat itu dibawah kepemimpinan birokrasi militer Punjabi di Pakistan Barat. Namun, perjuangan yang dilakukan oleh kelompok perjuangan Bengali ini menunjukkan kesan yang meremehkan identitas muslim. Kesan tersebut berupa perkara identitas Bangladesh, di mana perjuangan kelompok separatis menjadikan etnisitas Bengali yang dekat dekat Hindu menjadi identitas negara mereka, padahal muslim merupakan populasi mayoritas di Bangladesh (Hossain, 2012). Selain itu, semangat kebangkitan di Bangladesh juga terinspirasi dari pengaruh keberhasilan gerakan kebangkitan Islam di beberapa negara lain seperti Iran, Turki, Mesir, Tunisia, Maroko, Yaman (Hoque, Ali, & Al-azhari, 2013).

Bangladesh sebagai negara dengan mayoritas muslim baru bergerak menuju sistem demokrasi parlementer sejak 1972, setelah merdeka pada masa pemerintahan Mujibur Rahman. Mujib mengumumkan reformasi negara Bangladesh, seperti memilih memajukan ekonomi dengan bantuan dari barat. Era pemerintahannya, Mujib dan Liga Awami ditantang untuk mengatasi badai ekonomi yang disebabkan kenaikan harga minyak internasional. Periode 1974 hingga 1975 Bangladesh berada pada tingkat kelaparan yang sangat tinggi, produk domestik bruto meningkat 2% dan populasi yang bertambah 3% menyebabkan perekonomian nasional menurun dan Bangladesh menghadapi defisit pembiayaan. Rezim Mujib tidak dapat keluar dari masalah ekonomi negara, dan dianggap sebagai pertanda buruk bagi sistem demokrasi yang diterapkan. Rezim Mujib juga semakin sulit dijalankan karena meningkatnya konflik sosial di masyarakat dan korupsi yang terjadi di partai politik mereka. Masyarakat yang diorganisir mahasiswa menentang demokrasi parlementer dan menginginkan revolusi Liga Awami yang berbasis pada kekuatan sosial kelompok menengah ke bawah. Rezim Mujib mengalami krisis kepercayaan karena kemampuannya yang lemah untuk membuat Bangladesh bebas dari masalah ekonomi dan berakhir dengan kudeta pada Agustus 1975 (Jalal, 2004).

Pemerintahan kemudian dilanjutkan oleh Ziaur Rahman yang memiliki latar belakang anggota militer. Sebagai pemimpin baru, Ziaur Rahman mendirikan Bangladesh National Party (BNP), akan tetapi seiring perkembangannya BNP Ziaur Rahman terlibat koalisi dengan Jamaat e-Islami Bangladesh dan memberikan posisi kepada mereka di pemerintahan.

Pemerintahannya juga berakhir dengan kudeta, dan menjadi kudeta terakhir yang terjadi di Bangladesh, digantikan oleh H. M Irsyad (Agoes, 2020).

Proses demokratisasi Bangladesh telah dinodai karena kurangnya persatuan di antara partai politik dan juga masyarakatnya. Politisi Bangladesh cenderung meninggalkan nilai dan norma demokrasi karena ingin mendahulukan kepentingan individu dan kelompok mereka. Kudeta militer terhadap Mujib telah memicu lahirnya perebutan kekuasaan antara pihak oposisi dan pemilihan umum partai politik seperti Bangladesh Nationalist Party, Liga Awami, Jamaat e-Islami Bangladesh, Jatiya Party, tidak mampu mengedepankan demokrasi melainkan mencoba untuk menguasai demi kepentingan masing-masing partai (M. M. Khan & Husain, 2014).

Persaingan dalam pemerintahan Bangladesh kian bertambah buruk pada tahun 2000-an. Kemenangan partai BNP memicu kekerasan berupa pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan dan penghancuran berbagai properti. Kekuasaan dominan dipegang oleh dua partai besar BNP dan Liga Awami. Kedua partai ini berusaha untuk menguasai dan mengontrol lembaga pemerintahan. Hal ini bertambah parah ketika masing-masing partai ini memiliki dukungan kelompok radikal yang mengintimidasi satu sama lain (Jahan, 2003).

Kelompok oposisi BNP menggunakan berbagai macam cara pemberontakan terhadap pemerintahan terpilih, dan sengaja melanggar aturan-aturan yang ada. Akibatnya, fundamentalis Islam mulai dibingkai dengan kekerasan, di mana pada tahun 2005 ratusan bom rakitan meledak diberbagai wilayah dalam waktu satu jam (Brass, 2011). Tidak hanya itu, kekacaun politik Bangladesh melahirkan berbagai organisasi masyarakat lain seperti Bangladesh Chhatro League yang anggota kebanyakan mahasiswa, Jubo League dengan anggota kalangan remaja lebih luas, Bangladesh Krishak Sramik League bagi pekerja dan petani, Bangladesh Swechchasebak bagi sukarelawan dan organisasi lainnya (Suykens, 2015). Akhirnya, kelompok yang merasa didiskriminasi secara terang-terangan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang dianggap telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, dengan melakukan penjarahan atas berbagai sumber daya negara (Hossain, 2012).

Dengan demikian, terlihat bahwa proses demokratisasi di Bangladesh tidak berjalan mulus. Bahkan demokratisasi yang berlangsung melahirkan radikalisme dari kelompok

oposisi, yang sekaligus menjadi persoalan serius dalam berjalannya demokratisasi tersebut. Hal ini terjadi karena lemahnya pilar-pilar demokrasi di negara ini.

Perkembangan Sikap Intoleran Gerakan Islam Radikal di Bangladesh

Bangladesh memiliki populasi yang lebih dari 140 juta orang yang terdiri dari empat agama besar, yaitu Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dengan penduduk mayoritasnya beragama Islam. Sejak tahun 1999 hingga 2005 Bangladesh, dilanda gelombang militansi Islam yang memicu kekhawatiran media dan akademis bahwa Bangladesh akan menjadi mangsa ekstremisme Islam (Harrigan, 2018). Ekstremisme Islam yang dialami Bangladesh selama tahun tersebut sebagian besar merupakan hasil dari ideologi yang dibawa ke Bangladesh oleh orang-orang yang kembali dari perang Afghanistan melawan pendudukan Soviet pada 1980-an. Pejuang yang kembali ke Bangladesh percaya bahwa ideologi Islam yang mereka temui dan diserap di Afghanistan dapat ditransplantasikan ke komunitas Muslim Bangladesh. Akibatnya, intoleransi Bangladesh mengakar karena isu agama diperebutkan di Bangladesh (M. Khan, 2011).

Faktor eksternal lainnya yang juga mempengaruhi perkembangan intoleransi Bangladesh yaitu pada lapisan masyarakat dan pemerintahan negara Bangladesh. Di tingkat makro, para elit sosial politik menggunakan Islamisme sebagai tujuan politik dan mempertahankan kekuasaan negara serta mencoba mengalihkan permasalahan kemiskinan dengan menggunakan strategi 'amal' untuk madrasah dan masjid. Pada tingkat menengah, masyarakat dan akademisi Islam yang mengalami penurunan keilmuan, khususnya mullah yang berbasis di masjid gagal menerjemahkan Islam yang sebenarnya dan melahirkan kebingungan di kalangan masyarakat lainnya. Serta tingkat mikro, terjadi pemaksaan penerapan Islam versi Timur Tengah oleh pekerja migran yang kembali ke kampung halamannya yang dominan masyarakat miskin dan buta huruf (Bhardwaj, 2011). Faktor mikro ini menjadi cara mudah mengeksploitasi pemuda buta huruf dan pengangguran Bangladesh agar dijadikan sebagai ekstremis Islam.

Perkembangan intoleransi agama di Bangladesh juga memicu perdebatan antara "suci" dan "sekuler", dan bahkan agama membingkai perdebatan politik yang terjadi di Bangladesh. Yang "suci" berpendapat bahwa Bangladesh didirikan di atas Islam sebagai ideologinya, karena pembentukan negara tidak dapat dipisahkan dari sejarah tahun 1948,

ketika Ali Jinnah menyatakan bahasa Urdu sebagai bahasa negara dan mendiskriminasi Bengali yang merupakan kelompok muslim dan memiliki perbedaan pandangan sosial dan politik sehingga mereka tidak memiliki masa depan sekuler (Bhardwaj, 2011). Adapun "Sekularis" bersikeras bahwa perang pembebasan tahun 1971 (perang kemerdekaan) dan fakta bahwa Bangladesh memisahkan diri dari negara Islam Pakistan menegaskan masa depan sekulernya. Di dalam ruang yang perdebatan ini, masyarakat dihadapkan pada sebuah pemerintahan yang terpolarisasi dan terbagi antara partai-partai yang berorientasi kiri - Liga Awami dan partai-partai komunis lainnya, sedangkan sayap kanan, Partai Nasional Bangladesh (BNP) dan partai-partai agama (Pattanaik, 2010).

Perkembangan gerakan radikal di Bangladesh terus dipengaruhi oleh para jihadis Jamaat-e-Islami yang telah memainkan peran penting dalam melatih dan mendoktrinasi masyarakat Bangladesh sehingga bersedia berperang di Afghanistan. Mujahidin terlatih kembali pada tahun 1990-an dan berniat untuk mengubah Bangladesh menjadi seperti Afghanistan dengan menjadikan Taliban Bangladesh. Oleh karena itu muncul keberadaan berbagai organisasi seperti Harkat-ul-Jihadi-Islam (HuJI) yang diciptakan oleh pejuang yang juga dikenal sebagai Taliban Bangladesh. Organisasi lain dari Timur Tengah seperti Ahl-e-Hadith Andolan Bangladesh (AHAB), yang menganut ideologi Wahhabi, menyebarkan jaringannya melalui dana bantuan, dan kemudian Jamaat-ul Mujahidin Bangladesh (JMB) yang juga menyebarkan jaringannya di Bangladesh. Meskipun HuJI memiliki jaringan transnasional dan bersekutu dengan berbagai kelompok lain di India dan berjuang dengan agenda pan-Islam, kelompok seperti AHAB dan JMB lebih fokus pada Bangladesh dan menginginkan Bangladesh, yang merupakan negara mayoritas Muslim, untuk diperintah oleh Syariah (Pattanaik, 2010).

Kerentanan Bangladesh membuat negara ini tidak berhenti menghadapi ancaman dari terorisme Islam. Gerakan terorisme terus berkembang pesat di Bangladesh sejak 11 September 2001. Terorisme di Bangladesh tidak lepas dari proses Islamisasi, konflik antara dua partai politik utama dan pemerintahan yang otoriter. Kelemahan institusional dari sistem keamanan dan peradilan Bangladesh juga menjadi faktor berkembang pesatnya radikalisme Bangladesh (Lorch, 2020). Bahkan kelompok radikal Bangladesh melibatkan diri di kancah internasional, di mana pada tahun 2002, kelompok radikal HUJI dan sembilan kelompok fundamentalis Islam lainnya menyelenggarakan pertemuan di sebuah kamp di dekat kota

Ukhia dengan agenda pembentukan Bangladesh Islamic Manch. Kelompok radikal di Bangladesh mengambil peran terhadap permasalahan di luar negaranya, di mana asosiasi Bangladesh Islamic Manch tersebut dimaksudkan untuk mewakili Muslim Rohingya, Muslim di Burma, dan Pembebasan Muslim Assam (Lintner, 2002).

Serangan kelompok terorisme pada tahun 2016 membuat isu radikalisme di Bangladesh menjadi perhatian internasional, di mana terjadi serangan terhadap sebuah kafe di lingkungan Ibu Kota Dhaka. Serangan tersebut menewaskan 29 orang, dan kebanyakan orang asing. Serangan itu terjadi setelah serangkaian serangan terhadap agama dan etnis minoritas, orang asing, aktivis liberal, penulis, dan penerbit oleh kelompok yang berafiliasi dengan AQIS dan ISIS. Akan tetapi, pemerintah Bangladesh menyangkal keberadaan kelompok militan yang terkait dengan organisasi teroris internasional tersebut. Sedangkan laporan pers menyatakan, berdasarkan penangkapan 112 tersangka ekstremis terlibat mengaku mereka memiliki koneksi luar negeri. Jaringan mereka diperoleh dengan bepergian ke negara lain atau melalui sambungan konferensi internet (A Riaz & Parvez, 2018).

Memang, cukup sulit untuk mengidentifikasi kelompok radikal Bangladesh secara pasti, sebab kelompok radikal ini secara konstan melakukan perubahan nama untuk menghindari pelacakan. Terdapat laporan menurut *Daily Star* bahwa ada lebih dari 30 organisasi militan keagamaan dengan jaringan luas telah tersebar di seluruh Bangladesh sejak tahun 1989. Beberapa nama kelompok tersebut adalah Harkatul Jihad, JMB, Jagrata Muslim Janata Bangladesh (JMJB), Hizbut Towhid, Hizbut Tahrir Bangladesh, Islami Biplobi Parishad, Ahle Hadith Andolon, Allahr Dal, Partai Jihadi, Front Bishwa Islami, Al Jomiatul Islamia, Al Khidmat Bahini, Al Mujhid, Iqra Islami Jote, Duranta Kafela dan lain-lain. Meskipun memiliki penafsiran yang berbeda, kelompok ini memiliki tujuan yang serupa yaitu mendirikan negara Islam Bangladesh (Haque Khondker, 2010).

Pada pemilihan yang dimenangkan AL diakhir tahun 2008, partai sayap kanan dan kelompok oposisi lainnya menggunakan agama sebagai strategi perlawanan. Kelompok oposisi ini menyatakan slogan '*selamatkan negara, selamatkan rakyat*' dan menuduh bahwa Islam akan mengalami kemunduran seiring dengan berkuasanya AL. Sikap fanatik oleh sayap kanan membuat pemerintah menangkap para pemimpin kelompok Jamaat-e-Islami pada 2010 karena terdapat gugatan dari masyarakat (Haque Khondker, 2010).

Gangguan Radikalisme Terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Bangladesh

Perkembangan radikalisme menjadi tantangan serius demokratisasi di Bangladesh. Kehadiran kelompok-kelompok radikal menghilangkan perasaan aman di tengah masyarakat. Sejak tahun 1990-an, dua partai politik besar Bangladesh beserta kelompok pendukungnya, telah kehilangan kepercayaan antara satu sama lain. Kelompok sayap kanan menuduh AL berkolaborasi dengan India. Sebaliknya kelompok sayap kiri menyatakan bahwa BNP menindas umat Hindu Bangladesh (Brass, 2011).

Sementara itu, gerakan radikal terus berkembang dan mempengaruhi masyarakat khususnya, kalangan mahasiswa. Dalam hal ini, media sosial berperan dalam radikalisasi mahasiswa. Kesenjangan yang terjadi diperburuk oleh penggunaan media sosial, menjadi sarana efektif dalam penyebaran ideologi radikal (Amit, Rahman, & Mannan, 2020). Keberadaan media sosial bahkan dinilai mampu meradikalkan kelompok yang selama ini dikenal sekuler. Ekstrimis Islam mempengaruhi kaum muda kelas menengah dengan latar belakang perkotaan dan sekuler melalui ruang siber, dan berbagai kelompok menjadi sasaran untuk melakukan pembunuhan karena perbedaan ideologi mereka (Mostofa, 2021). Perbedaan ideologi ini juga dikaitkan dengan keberadaan gerakan transnasional radikal yang menyusup masuk ke sistem pendidikan di Bangladesh. Madrasah-madrasah yang didirikan mengindoktrinasi, menjadikan lagu kebangsaan dan bendera negara sebagai simbol anti Islam. Oleh karena ini, masyarakat menjauh dari sekuler dan memeluk intoleransi agama (Datta, 2007).

Demokrasi yang menjamin ketentraman dari sikap toleransi masyarakat tidak dapat terwujud di Bangladesh. Hal ini karena kelompok radikal menggunakan serangan dengan taktik bunuh diri untuk memaksakan sistem politik yang sesuai kehendak mereka. Serangan menggunakan bom bunuh diri merupakan serapan strategi perang Afghanistan ini digunakan untuk membunuh, melukai orang dan merusak lembaga serta program sekuler (M. Khan, 2011). Selain itu, hal lain yang membuat proses demokratisasi Bangladesh menghadapi jalan yang sulit adalah partai politik negara yang tidak mampu 'move on' dari otokrasi. Pemerintahan menjadi kacau karena pihak oposisi yang terus berusaha menggulingkan pemerintahan dan berebut kekuasaan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan perkembangan demokratisasi Bangladesh, politik Bangladesh beberapa kali mengalami pasang surut karena eksperimen

demokrasi yang digagalkan oleh kudeta militer sejak kemerdekaannya menunjukkan bahwa tidak ada demokrasi sejati dalam kepemimpinan partai di Bangladesh (Amundsen, 2016). Perlu dicatat juga jika masyarakat Bangladesh sebagian mempercayai bahwa pemimpin kelompok radikal adalah kebalikan dari elit penguasa. Ideologi ekstrim seakan telah meracuni pemikiran masyarakat, sehingga masyarakat Bangladesh terbagi kedalam kotak-kotak yang menganggap bahwa elit mereka mementingkan diri sendiri, pemerintahan AL adalah pemerintahan yang korup. Sedangkan sebagian lainnya menganggap tidak semua muslim baik, bahkan mengecam ahmadiyah (Ruud & Hasan, 2021).

Kemudian seiring dengan modernisasi, gangguan kelompok radikal berkembang pesat dan mencoba membangun banyak jaringan kelembagaan yang kuat dan berpengaruh di Bangladesh untuk mencapai cita-cita negara Islam. Pada era ini, ada beberapa kelompok yang dimuat dalam laporan *South Asia Terrorism Portal (SATP)* yang dinilai meresahkan masyarakat. Kelompok yang dianggap radikal dan lahir akibat kegagalan negara mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran dan kecacatan dalam tatanan politik Bangladesh ini, dijadikan sebagai kelompok terlarang karena tujuan dan tindakan mereka yang melanggar konstitusi Bangladesh.

Tabel A: South Asia Terrorism Portal – Bangladesh – Terrorist, Insurgent and Extremist Groups

Proscribed Terrorist/Extremist Groups	Active Terrorist/Insurgent Groups	Inactive Terrorist/Insurgent Groups
Harkat-ul-Jihad-al Islami Bangladesh (HuJI-B)	Hizb-ut-Tahrir (HuT)	Hizb-e-Abu Omar (HAO)
Jagrata Muslim Janata Bangladesh (JMJB)	Hizb-ut-Tawhid (HT)	Biplobi Communist Party (BCP)
Jama'atul Mujahideen Bangladesh (JMB)	Allah'r Dal	Gono Mukti Fauj (GMF)
Purba Banglar Communist Party (PBCP)	Al Qaeda/Al-Qaeda in Indian Subcontinent (AQIS)	Purba Banglar Sarbahara Party (PBSP)
Islami Chhatra Shibir (ICS)	-	Jasad Gono Bahini (JGB)
Islamic State/Islamic State of Iraq and Levant/ Islamic State of Iraq and Syria/Daish (ISIS)	-	Hikmat-ut-Jihad
Ansarullah Bangla Team (ABT)	-	Ahle Hadith Andolan Bangladesh (AHAB)
Ansar al-Islam	-	-
Lashkar-e Toiba (LeT)	-	-

Sumber: <https://www.satp.org/terrorist-groups/Bangladesh>

Beberapa kelompok ini dianggap pemerintah Bangladesh berusaha mendramatisir dan mengeksploitasi kegagalan pemerintah. Apalagi perkembangan demokrasi di Bangladesh sampai saat ini belum mengindikasikan tanda semakin membaik. Ketidakstabilan politik Bangladesh membawa pengaruh terhadap perguruan tinggi di Dhaka, Jahangirnagar, Rajshahi, Chittagong karena mahasiswa mereka ikut bergabung dengan kelompok Islam dan melakukan pemberontakan. Bahkan ledakan bom Bangladesh pada tahun 2005 melibatkan mahasiswa yang merupakan anggota Jama'atul Mujahideen Bangladesh (JMB) (Anderson, 2006).

Tahun 2005 hingga 2016, Bangladesh menjadi tempat kekerasan ekstremis Islam, di mana sekitar 600 orang tewas dalam serangan pemberontakan. Diantara kelompok dalam tabel A, anggota kelompok JMB tercatat paling aktif melakukan banyak serangan teroris, dimana dalam jangka waktu 63 hari mereka meledakkan 459 bom yang tersebar di 64 distrik Bangladesh sebagai upaya kelompok ini mendorong negara mengadopsi hukum Syariah (Fair, Hamza, & Heller, 2016).

Sejak 2015 kelompok militan seperti *Al-Qaeda in Indian Subcontinent (AQIS)* dan *Islamic State (IS sekarang ISIS)* telah masuk membangun jaringan di Bangladesh. Secara terang-terangan melalui internet, AQIS mengunggah video dengan judul "*From France to Bangladesh: The Dust Will Never Settle Down*". Isi video berupa pengakuan AQIS, bahwa mereka yang menyebabkan pembunuhan di Bangladesh dan di Pakistan yang total ada 14 serangan dengan korban jiwa dua warga asing, dua lainnya dengan luka serius (Ali Riaz, 2019). Mereka juga mengatakan tempat ibadah umat Syiah Bangladesh dan menyebabkan lebih banyak korban yaitu 80 orang terluka. Dengan sengaja mereka menargetkan serangan ke tempat ibadah kelompok syiah bertepatan dengan perayaan Asyura yang dihadiri kurang lebih dua 20 ribu orang yang berada di dalam dan diluar kuil (Nugraha, 2015).

Kondisi ini menyebabkan radikalisme berkembang subur di Bangladesh. Berdasarkan data yang dipublish Global Terrorism Index 2020, Bangladesh berada pada urutan ke-33 sebagai negara yang paling rawan dalam isu terorisme di dunia. Bangladesh berada di bawah negara Arab Saudi dan diatas Republik Chad.

Tabel B: 2020 Gobal Terrorism Index – Measuring the Impact of Terrorism

Ra nk	Country	Score	Range Change	Ra nk	Country	Score	Range Change	Ra nk	Country	Score	Range Change
1	Afghanis tan	9.592	=	29	U.S.A	5.260	+2	57	Jordan	3.149	+5
2	Iraq	8.682	=	30	U.K	5.161	-4	58	Tanzania	3.112	+2
3	Nigeria	8.314	=	31	Palestine	5.077	+1	59	Belgia	3.043	-6
4	Syria	7.778	=	32	Saudi Arabia	5.000	-3	60	Italia	3.043	+3
5	Somalia	7.645	+1	33	Bangladesh	4.909	-3	61	Swedia	2.892	-5
6	Yaman	7.581	+1	34	Chad	4.829	+4	62	Irlandia	2.845	+7
7	Pakistan	7.541	-2	35	Burundi	4.702	-2	63	Spain	2.810	-4
8	India	7.353	=	36	Ukraina	4.692	-11	64	Bolivia	2.795	-6
9	RD Kongo	7.178	+1	37	Indonesia	4.629	-2	65	Algeria	2.696	-8
10	Filipina	7.099	-1	38	Prancis	4.614	-2	66	Belanda	2.689	+11
11	Mali	7.049	+2	39	Rusia	4.542	-2	67	Ekuador	2.606	+6
12	Burkina Faso	6.755	+15	40	Israel	4.522	=	68	Brazil	2.443	+6
13	Kameroon	6.627	+1	41	Afrika Selatan	4.358	=	69	Zimbabwe	2.443	-1
14	Egypt	6.419	-3	42	New Zealand	4.337	+79	70	Paraguay	2.414	-6
15	Mozambiqu	6.400	+8	43	Meksiko	4.316	+5	71	Bahrain	2.402	-10
16	Libya	6.250	-4	44	Greece	4.182	+2	72	Haiti	2.355	+6
17	Central African Republic	6.241	-2	45	Tajikistan	4.180	+6	73	Nicaragua	2.355	-8
18	Turkey	6.110	-2	46	Iran	4.157	-7	74	Australia	2.148	-2
19	Colombia	6.100	=	47	Chile	4.031	-2	75	Peru	2.141	-8
20	Sri Lanka	6.065	+35	48	Germany	3.965	-4	76	Malaysia	2.090	-5
21	Thailand	5.783	-3	49	Tunisia	3.858	+1	77	Republik Kongo	2.043	-7
22	South Sudan	5.726	-5	50	Rwanda	3.754	+16	78	Honduras	2.023	+20
23	Kenya	5.644	-2	51	Lebanon	3.661	-8	79	Jepang	2.014	-1
24	Niger	5.617	-2	52	Venezuela	3.658	-5	80	Pantai Gadang	1.945	-6
25	Myanmar	5.543	-1	53	China	3.587	-11	81	Kuwait	1.795	-5
26	Sudan	5.401	-6	54	Angola	3.429	-2	82	Ghana	1.743	+4
27	Nepal	5.340	+7	55	Uganda	3.278	-6	83	Finlandia	1.721	-3
28	Ethiopia	5.307	=	56	Kanada	3.171	-3				

Sumber: <https://visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf>

Dalam data tabel GTI 2020, Bangladesh hanya turun 3 tingkat dari posisi sebelumnya, dan menjadikan Bangladesh sebagai negara berkembang dengan mayoritas muslim dan rentan terhadap kelompok teroris (IEP, 2019). Adapun ketidakamanan negara Bangladesh membuat negara ini beberapa kali mengganti sistem pemerintahan negaranya. Menurut Agoes Afiya, sistem pemerintahan Bangladesh sempat mengalami beberapa fase, di antaranya; 1) Era Parlemeter Pertama oleh Syeikh Mujibur Rahman, merupakan konstitusi pertama Bangladesh yang dimulai 1972 hingga 1975. 2) Era Militer oleh Ziaur Rahman 1975 hingga 1981. Jendral Zia juga sebagai pencetus Bangladesh National Party (BNP). 3) Era Militer Hussain M. Irsyad tahun 1982-1990. 4) Era pemerintahan sementara (*Caretaker Government*) Bangladesh, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung pada tahun 1996 dan 2008. 5) Kembali ke era parlementer sejak pemerintahan Khaleda Zia (Agoes, 2020).

Sistem pemerintahan yang sering mengalami perubahan ini mengindikasikan bahwa upaya mewujudkan demokrasi sejati di negara dengan penduduk mayoritas muslim seperti Bangladesh bukan merupakan perkara mudah. Selain persoalan dengan kaum muslim yang memiliki pandangan dan keyakinan sendiri yang cenderung radikal dalam hal bernegara, negara Bangladesh juga menjadi rapuh akibat tidak adanya kepercayaan dan kedamaian didalam pemerintahannya. Perjalanan demokrasi Bangladesh tidak pernah mulus karena masalah persaingan kejam antara kekuatan moderat dan sekuler yang tidak pernah berakhir. Bahkan dalam pelaksanaan pemilihan umum Bangladesh yang terakhir kali dilakukan pada 2018, terjadi pemberontakan dari partai sayap kanan BNP yang beraliansi dengan Front Jatiya Oikya (Khalid, 2018).

Pemberontakan pada pemilihan tersebut menewaskan 17 orang dan 20 orang terluka antara pendukung AL dan BNP (Amstrong, 2018). Akan tetapi pemilihan umum berhasil dimenangkan oleh Perdana Menteri Syeikh Hasina dari partai Awami League dengan perolehan 293 dari 300 kursi (Agoes, 2020). Hal ini tentu menambah catatan kemenangan yang diperoleh AL atas BNP, dan sekaligus menambah catatan kekerasan yang melibatkan partai agama sayap kanan BNP di dalamnya. Hal ini juga semakin membuktikan bahwa Bangladesh sulit untuk mencapai cita-cita yang diharapkan melalui demokrasi negaranya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa radikalisme merupakan tantangan berat bagi perkembangan masa depan demokrasi di Bangladesh. Sejak pemerintahan

parlementer Mujibur Rahman. kelompok fanatik muslim menolak sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Tata kelola pemerintahan Mujib yang lemah dan persaingan oposisi partai politik membuka jalan bagi kelompok radikal untuk mencoba berbagai cara untuk mengemukakan keinginan mereka.

Ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan permasalahan negara memicu kelompok ekstrimis mengeksploitasi individu dan kelompok Islam untuk bergabung menjadi anggota mereka dan melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Selain itu, mereka pun juga intens terhubung dengan gerakan terorisme internasional yang membuat radikalisme menjadi subur.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, A. M. (2020). Politik & pemerintahan bangladesh. Malang.
- Amit, S., Rahman, I., & Mannan, S. (2020). Social media and radicalisation of university students in Bangladesh. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 15(3), 228–243. <https://doi.org/10.1080/18335330.2020.1820070>
- Amstrong, M. (2018, December 30). 17 killed in Bangladesh election violence Euronews. Euronews, p. 1. Retrieved from https://www-euronews-com.translate.google.com/2018/12/30/17-killed-in-bangladesh-election-violence?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=op,sc
- Amundsen, I. (2016). Democratic dynasties? Internal party democracy in Bangladesh. *Party Politics*, 22(1), 49–58. <https://doi.org/10.1177/1354068813511378>
- Anderson, L. C. (2006). The Rise of Islamist Militancy in Bangladesh. In *Biologia Centrali-America* (Vol. 2). Washington DC.
- Arefin, M. N., & Ritu, N. S. (2021). Addressing the political dynamics of radicalization leading to religious extremism in Bangladesh. *Simulacra*, 4(1), 115–129. <https://doi.org/10.21107/sml.v4i1.10543>
- Aulihadi, A. (2018). Sejarah Lahirnya Negara Bangladesh. *Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 02(02), 43–54. Retrieved from <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/index>
- BBS. (2018). Bangladesh Statistics 2018. Bangladesh Bureau of Statistics Statistics and Informatics Division Ministry of Planning, 74.
- Bhardwaj, S. K. (2011). Contesting identities in Bangladesh: a study of secular and religious frontiers. In *Asia Research Centre*. Retrieved from <http://www.lse.ac.uk/collections/asiaResearchCentre/>
- Brass, P. R. (2011). Routledge handbook of South Asian politics: India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, and Nepal. In *Choice Reviews Online* (I, Vol. 48). <https://doi.org/10.5860/choice.48-5933>
- Datta, S. (2007). Islamic military in Bangladesh: The threat from within. *South Asia: Journal of South Asia Studies*, 30(1), 145–170. <https://doi.org/10.1080/00856400701264084>
- Fair, C. C., Hamza, A., & Heller, R. (2016). Who Supports Islamist Militancy in Bangladesh: What the Data Say? *SSRN Electronic Journal*, (Gowen 2014), 1977–1980. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2804275>

- Ghifarie, I. F. (2016). Teologi Hakimiyah: Benih Radikalisme Islam. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 2(1), 10. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i1.96
- Haque Khondker, H. (2010). The Curious Case of Secularism in Bangladesh: What is the Relevance For The Muslim Majority Democracies? *Totalitarian Movements and Political Religions*, 11(2), 185–201. <https://doi.org/10.1080/14690764.2010.512743>
- Harrigan, J. (2018). The rise of religious-based radicalism and the deradicalization programme in bangladesh. In *Deradicalising Violent Extremists: Counter-Radicalisation and Deradicalisation Programmes and their Impact in Muslim Majority States* (pp. 51–73). <https://doi.org/10.4324/9780203103241-3>
- Hoque, N., Ali, M. D. H., & Al-azhari, B. M. M. R. (2013). Islamic Resurgence Movements in Bangladesh: Experiences from Iran and Turkey. 3(2), 73–84. <https://doi.org/10.5829/idosi.wjihc.2013.3.2.3205>
- Hossain, A. A. (2012). Islamic resurgence in Bangladesh's culture and politics: Origins, dynamics and implications. *Journal of Islamic Studies*, 23(2), 165–198. <https://doi.org/10.1093/jis/ets042>
- IEP. (2019). Global Terrorism Index 2020 : Measuring The Impact of Terrorism. Retrieved from South Asia Terrorism Portal website: <https://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/11/GTI-2020-web-1.pdf>
- Jahan, R. (2003). *Bangladesh in 2002 : Imperiled Democracy*. Univesrsity of California Press, 116(1), 28–47.
- Jalal, A. (2004). *Democracy and Authoritarianism in South Asia (II)*. Cambridge.
- Karim, L. (2004). Democratizing Bangladesh: State, NGOs, and militant Islam. *Cultural Dynamics*, 16(2–3), 291–318. <https://doi.org/10.1177/0921374004047752>
- Khalid, S. (2018, December 30). Bangladesh Polls close in election marred by violence Elections News Al Jazeera. ALJAZEERA, p. 1. Retrieved from https://www-aljazeera-com.translate.goog/news/2018/12/30/bangladesh-polls-close-in-election-marred-by-violence?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=op,sc
- Khan, H. M. (2017). *The Changing Face of Political Islam in Bangladesh : A Study in Quasi-Democracy (2009-16)*. (August 2016).
- Khan, M. (2011). Islamist militancy in bangladesh: Why it failed to take root. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 6(1), 51–64. <https://doi.org/10.1080/18335330.2011.553181>
- Khan, M. M., & Husain, S. A. (2014). Process of democratization in Bangladesh. *Contemporary South Asia*, 5(3), 319–334. <https://doi.org/10.1080/09584939608719799>
- Khan, Z. R. (1993). Bangladesh in 1992: Dilemmas of Democratization. *Asian Survey*, 33(2), 150–156. <https://doi.org/10.2307/2645324>
- Laisa, E. (2014). Islam Dan Radikalisme. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i1.554>
- Lewis, D. (2004). On the difficulty of studying ' civil society ' : Reflections on NGOs , state and democracy in Bangladesh. *Sage Publication New Delhi*, 3(August 2000), 299–322.
- Lintner, B. (2002). Religious Extremism and Nationalism in Bangladesh. *Cultural Studies*, 16, 19–22.
- Lorch, J. (2020). Terrorism in Bangladesh: Understanding a complex phenomenon. *Asian Survey*, 60(4), 778–802. <https://doi.org/10.1525/AS.2020.60.4.778>
- M.M. Awal Hossain. (2015). *Democracy in Bangladesh : Problems & Prospects*. (October).

- Mahfud, U. A. (2020). Sosialisasi Nilai-Nilai Demokrasi Abdurrahman Wahid dalam Islam Modern Ubaidillah. 2507(1), 1–9.
- Mostofa, S. M.d, D. J. N. (2019). Profiles of Islamist Militants In Bangladesh. *Αγαη*, 13(5), 112–129. <https://doi.org/36.85.220.221>
- Mostofa, S. M. (2021). Understanding Islamist Militancy in Bangladesh. *Journal of Asian and African Studies*, 56(8), 2036–2051. <https://doi.org/10.1177/00219096211004630>
- Musdalipah. (2013). Berdirinya Negara Bangladesh. UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
- Nugraha, F. (2015). Serangan di Tempat Ibadah Bangladesh, 80 Orang Terluka. Retrieved from medcom.id website: <https://www.medcom.id/internasional/asia/GNlnJqXk-serangan-di-tempat-ibadah-bangladesh-80-orang-terluka>
- Patmasari, P. (2016). Mujibur rahman (1920-1975 M) dan Terbentuknya Negara Bangladesh.
- Pattanaik, S. S. (2010). Islamic extremism and the terror network in Bangladesh. In *Religion and Security in South and Central Asia* (pp. 96–114). <https://doi.org/10.4324/9780203840238-14>
- Putri, S. O. (2020). Demokrasi. Repository Unikom, pp. 6–9. Retrieved from <https://repository.unikom.ac.id/64326/1/Demokrasi.pdf>
- Riaz, A, & Parvez, S. (2018). Bangladeshi Militants: What Do We Know? *Terrorism and Political Violence*, 30(6), 944–961. <https://doi.org/10.1080/09546553.2018.1481312>
- Riaz, Ali. (2019). Who Are The Bangladeshi "Islamist Militants"? *American Journal of Sociology*, 53(9), 1689–1699.
- Rokhmad, A. (2012). Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79. <https://doi.org/10.21580/ws.20.1.185>
- Ruud, A. E., & Hasan, M. (2021). Radical Right Islamists in Bangladesh: A Counter-Intuitive Argument. *South Asia: Journal of South Asia Studies*, 44(1), 71–88. <https://doi.org/10.1080/00856401.2021.1847410>
- Suykens, B. (2015). The Distribution of Political Violence in Bangladesh (Vol. 151). <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>